

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penulis akan menuliskan secara rinci dan sistematis untuk memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami isi dari penulisan ini, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Pengaturan pengawasan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
2. Pelaksanaan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
3. Penerapan sanksi administratif bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang terbukti melakukan pelanggaran di Kota Semarang.

A. Pengaturan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Pengawasan terhadap suatu kegiatan sangat diperlukan dalam rangka penegakan norma hukum. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki peraturan khusus mengenai pengawasan PPTKIS. Disnakertrans Provinsi Jawa

Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap PPTKIS berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan PPTKIS secara umum. Berikut ini merupakan peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengawasan terhadap PPTKIS antara lain:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per 07/MEN/IV/2005 Tentang Standart Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 23/MEN/IX/2009 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 23/MEN/XI/2006 Tentang Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana Dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut akan dijelaskan oleh penulis secara rinci dibawah ini:

a.) Amandemen UUD 1945.

Pasal 27 ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan agar dapat mewujudkan kehidupan yang layak bagi kehidupan dan keluarganya. Kehidupan yang layak adalah keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh sebab itu, guna mewujudkan Pasal 27 ayat (2) Amandemen UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk memberikan

kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan kepada warganya, karena bekerja merupakan hak asasi setiap manusia seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
- 3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- 4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaan berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Berdasarkan uraian pasal diatas, pemerintah berupaya untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui pemberian kesempatan kerja pada warganya dengan menempatkan TKI di luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri.

- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri

Setiap individu memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Setiap individu juga

berhak untuk memilih tempat dimana ia akan bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Dikeluarkannya UU No. 39/2004 merupakan upaya pemerintah dalam membentuk peraturan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri dari perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan bagi TKI ini dilakukan mulai dari masa pra penempatan hingga purna penempatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 39/2004. Pemerintah juga memiliki tugas, tanggung jawab dan kewajiban dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang diatur dalam Bab II UU No. 39/2004. Pada Pasal 5 UU No. 39/2004 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU No. 39/2004. Pemerintah memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 39/2004.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23/2014 ini mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Urusan mengenai tenaga kerja merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 23/2014 yang menyebutkan bahwa: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi;

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

Urusan tenaga kerja bersifat konkruen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi. Adanya UU No. 23/2014 ini memperjelas mengenai pembagian tugas dan wewenang pemerintah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-undang ini menyatakan bahwa wewenang pemerintah pusat adalah menetapkan pengawasan ketenagakerjaan dan melakukan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan sedangkan wewenang dari pemerintah daerah provinsi adalah melakukan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan dalam UU No. 13/ 2003 diatur dalam Pasal 176 sampai Pasal 181. Tetapi UU No. 13/2003 ini tidak mengatur secara rinci mengenai pengawasan ketenagakerjaan. Menurut Pasal 176 UU No. 13/ 2003, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut dilaksanakan oleh instansi di bidang ketenagakerjaan baik pada lingkup pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (1) UU No. 13/2003.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pengawasan terhadap PPTKIS merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan TKI. Lahirnya PP No. 4/2015 ini tidak lepas dari kebijakan Nawa Cita yang menjadi kerangka kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Perlindungan ketenagakerjaan di dalam dan di luar negeri dimasukkan bersamaan dalam kerangka rencana kerja memberdayakan perempuan dalam politik dan pembangunan. Program memberdayakan perempuan dalam politik dan

pembangunan salah satunya dilakukan dengan memberikan perlindungan khususnya bagi pekerja informal seperti pembantu rumah tangga yang bekerja di dalam dan diluar negeri. Perlindungan ini dilakukan yaitu dengan⁴⁰;

- 1) memberikan pembatasan dan pengawasan peran swasta;
- 2) menghapus praktek diskriminatif terhadap buruh migran;
- 3) menyediakan layanan publik bagi buruh migran yang aman, murah dan mudah dalam tahapan pra penempatan, penempatan dan purna penempatan; dan
- 4) menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi buruh migran yang bermasalah.

PP No. 4/2015 berisi mengenai tata cara pengawasan dan hal-hal yang perlu diawasi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pasal 2 PP No. 4/2015 menyebutkan bahwa: pengawasan terhadap penyelenggara penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS secara bertahap mulai dari pra penempatan hingga purna penempatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 5 PP No. 4/2015.

⁴⁰Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla “*Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian*” tahun 2014.

7. Peraturan Presiden 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pemerintah menetapkan Perpres 21/2010 ini sebagai aturan pelaksanaan dari ketetapan Pasal 178 ayat (2) UU No 13/2003. Pasal 1 Perpres No. 21/2010 menyebutkan bahwa: pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sehingga segala kegiatan di bidang ketenagakerjaan, harus diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Proses kegiatan pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri juga di atur dalam PERMEN No. 22/2014. Kegiatan perekrutan maupun seleksi tenaga kerja yang dilakukan oleh PPTKIS harus berdasarkan peraturan yang tercantum dalam bagian kedua Permenaker No. 22/2014. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon TKI tercantum dalam Pasal 8 Permenaker No. 22/2014. Salah satu persyaratan yang penting adalah umur calon TKI tidak boleh kurang dari 18 tahun.

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Untuk mewujudkan pelaksanaan penempatan dan perlindungan bagi TKI di luar negeri agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan peraturan yang mengatur secara teknis atau lebih rinci mengenai pelaksanaan dan perlindungan bagi TKI yaitu dengan dikeluarkannya Pemenakertrans No. PER.14/MEN/2010. Peraturan ini mengatur mengenai pengurusan SIP, pendaftaran perekrutan dan seleksi terhadap pekerja, pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI, perjanjian kerja calon TKI dan kartu tenaga kerja luar negeri calon TKI.

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : Per 07/MEN/IV/2005 Tentang Standart Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Setiap perusahaan jasa penempatan TKI harus memiliki tempat penampungan bagi calon TKI/TKI selama masa pra penempatan sebelum calon TKI/TKI di kirim ke luar negeri. Tempat penampungan tersebut harus memiliki standart penampungan yang layak bagi calon TKI/TKI. Standart tempat penampungan bagi TKI di atur dalam Permenakertrans No. Per 07/MEN/IV/2005. Standart tempat penampungan bagi TKI harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis. Syarat adnistrasi tempat penampungan TKI terdapat pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah;

- 1) memiliki status kepemilikan atas penggunaan tempat penampungan calon TKI yaitu berupa sertifikat tanah dan ijin mendirikan bangunan (IMB) atau bukti sewa kontrak/kontrak sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun yang dibuat di hadapan notaris atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
- 2) mempunyai keterangan domisili atau yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah domisili tempat penampungan calon TKI;
- 3) memenuhi ketentuan dalam undang-undang gangguan atau surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh RT/RW dan Kepala Desa/Lurah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah setempat.

Syarat teknis tempat penampungan TKI terdapat pada Pasal 4. Pasal ini lebih menekankan pada fasilitas yang diberikan kepada calon TKI, seperti: kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang istirahat dan sebagainya. Sarana prasarana juga perlu diawasi agar calon TKI mendapatkan kenyamanan sebagaimana mestinya.

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri.

Setiap PPTKIS harus memiliki Perwakilan PPTKIS di negara tujuan penempatan atau biasa disebut *agency*. Perwakilan PPTKIS di

negara tujuan ini dapat terdiri dari beberapa PPTKIS maupun PPTKIS sendiri. Keberadaan perwakilan PPTKIS ini sangat penting karena berfungsi untuk mendata kedatangan dan kepulangan TKI di luar negeri, memantau kondisi TKI yang ada di luar negeri, membantu menyelesaikan kasus TKI, membantu TKI berkomunikasi dengan keluarganya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Permenakertran No. 6/2013. Ketiadaan perwakilan PPTKIS dapat berakibat fatal karena akan sulit mendapatkan informasi mengenai kondisi TKI di negara tujuan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan mengenai perwakilan PPTKIS di luar negeri.

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 23/MEN/IX/2009 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri sangat penting. Pasal 3 Permen No. 23/MEN/IX/2009 menyebutkan bahwa: setiap calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Pendidikan dan pelatihan kerja dapat dilakukan oleh PPTKIS secara tersendiri atau calon TKI/TKI dapat dititipkan kepada dinas tenaga kerja di kota/kabupaten setempat. Tujuan diberikannya pendidikan dan pelatihan kerja adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kerja bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan agar calon TKI/TKI

mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja.

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 23/MEN/XI/2006 Tentang Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana Dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting untuk menunjang terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. PPTKIS dalam melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri juga harus memenuhi sarana dan prasarana penempatan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Permen Nomor Per 23/MEN/XI/2006 menyebutkan bahwa PPTKIS harus memiliki sarana dan prasarana sekurang-kurangnya berupa berupa kantor, tempat penampungan yang layak dan pelatihan kerja.

B. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

Pengawasan terhadap PPTKIS adalah salah satu bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi TKI atau calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu di bidang tenaga kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan berada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan sistem pengawasan. Pengawasan terhadap PPTKIS di Jawa Tengah dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang dibantu oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka, pengawasan adalah tindakan yang bertujuan untuk melihat apakah suatu pelaksanaan tugas telah sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang dikehendaki. Pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh PPTKIS dalam melakukan kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang semestinya atau tidak.

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (yang selanjutnya disebut Pergub Jateng 64/2016). Pengawasan ketenagakerjaan termasuk pengawasan terhadap PPTKIS mengacu pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 Pergub Jateng 64/2016. Pasal 36 Pergub Jateng 64/2016, bidang pengawasan ketenagakerjaan memiliki tugas, yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Terdapat 3 (tiga) seksi di bidang pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Seksi pengawasan norma kerja;
2. Seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
3. Seksi penegakan hukum ketenagakerjaan.

Ketiga seksi tersebut memiliki tugas masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pergub Jateng 64/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Dari ketiga seksi pengawasan tersebut, peneliti hanya mengambil tugas seksi pengawasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seksi pengawasan norma kerja dan seksi penegakan hukum ketenagakerjaan. Tugas seksi pengawasan norma kerja tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Pergub Jateng 64/2016 yang menyatakan bahwa: seksi pengawasan norma kerja mempunyai

tugas, melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja. Sedangkan tugas dari seksi penegakan hukum ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 41 Pergub Jateng 64/2016 yang menyatakan bahwa: seksi penegakan hukum ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum ketenagakerjaan.

Tugas-tugas Disnakertran Provinsi Jawa Tengah khususnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan telah dijabarkan dalam Pasal 35 hingga Pasal 41 Pergub 64/2016. Uraian dalam Pasal 35 hingga Pasal 41 juga telah sesuai dengan Perpres 21/2010. Adanya pembagian tugas pengawasan yang diatur dalam Pergub 64/2016 ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan di bidang ketenagakerjaan khususnya pengawasan PPTKIS, perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri.

Penulis membahas pelaksanaan pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS, dalam tiga kelompok berikut;

1. sistem dan mekanisme pengawasan PPTKIS oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah;
2. pelaksanaan pengawasan pada tahap-tahap penempatan;
3. perubahan sikap setelah adanya pengawasan pada masing-masing tahap penempatan.

1. Sistem dan mekanisme pengawasan PPTKIS oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan terhadap PPTKIS dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu datang ke lapangan atau perusahaan PPTKIS dan memantau melalui sistem online yang disebut SiskoTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri)⁴¹. Pengawasan yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah menggunakan sistem online. Hal ini dibenarkan oleh PT. Kanzana Rossie dan cabang PT. Mitra Sinergi Sukses. Pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tidak datang dan melihat secara langsung bagaimana proses prekrutan maupun seleksi yang dilakukan oleh PT. Kanzana Rossie. Pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah hanya memantau melalui sistem yang bernama siskoTKLN.⁴²

Jadi dapat dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS bersifat langsung dan tidak langsung. Pengawasan bersifat langsung karena pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara langsung kelapangan yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun. Pengawasan bersifat tidak langsung dilakukan dengan memantau melalui sistem online SiskoTKLN. Sistem online SiskoTKLN yang digunakan oleh

⁴¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Erry Diah Nurhidayah kepala seksi pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, hari Jumat 10 Februari 2017 pukul 07.30.

⁴² Wawancara pribadi dengan Ibu Ninik Suprpti selaku direktur di PT. Kanzana Rossie, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, pukul 10.00.

Disnakertrans Jawa Tengah sudah terhubung dengan PPTKIS, BP3TKI dan Disnakertrans Provinsi. Adanya sistem ini mempermudah pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan.

Disnakertras Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap PPTKIS berpedoman pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) mengenai Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri “Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Tahun 2016”



Bagan 1.2 SOP Pengawasan dan Pemeriksaan PPTKIS

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah (data yang telah diolah)

Dari paparan bagan SOP di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap PPTKIS, Disnakertrans Provinsi Jawa

Tengah terlebih dahulu harus membuat rencana kerja. Rencana kerja tersebut kemudian akan dikoordinasikan kepada dinas kabupaten/kota. Setelah itu dinas akan melakukan pengawasan secara langsung dengan datang ke PPTKIS. Hasil pemeriksaan tersebut akan dituangkan dalam nota pemeriksaan. Apabila PPTKIS sudah melakukan penempatan TKI secara benar dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka selesai. Apabila dalam hasil pengawasan, PPTKIS tidak melakukan penempatan TKI secara benar dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka akan diberikan nota peringatan hingga penjatuhan sanksi.

2. Pelaksanaan pengawasan pada tahap-tahap penempatan.

Pada umumnya tahap-tahap penempatan TKI terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Pengawasan terhadap PPTKIS oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ini hanya dilakukan pada tahapan pra penempatan dan purna penempatan. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tidak mengawasi pada masa penempatan. Pengawasan pada masa penempatan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan permohonan visa bekerja. Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS pada pra penempatan dan purna penempatan selanjutnya akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

a) Tahapan pra penempatan.

Pada tahapan pra penempatan ini, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada

PPTKIS. Pendampingan dan bimbingan teknis ini mengenai persyaratan menjadi TKI yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang harus dipenuhi agar PPTKIS dapat melakukan kegiatan penempatan TKI. PPTKIS harus memiliki SIPPTKI agar dapat melakukan perekrutan calon TKI. SIPPTKI ini diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. SIPPTKI dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suatu PPTKIS memiliki ijin atau legal. PPTKIS juga berkewajiban memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban calon TKI, tata cara perekrutan, situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Pengawasan pada pra penempatan lebih menekankan kepada proses perekrutan calon TKI dan pelayanan berupa sarana prasarana yang diberikan oleh PPTKIS kepada calon TKI. Dalam proses perekrutan calon TKI, PPTKIS wajib memberikan laporan mengenai data-data calon TKI kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan BP3TKI. Sehingga data-data dari calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri dapat terdaftar pada sistem SiskoTKLN tersebut. Pengawasan terhadap PPTKIS dilakukan terhadap 2 (dua) hal yang penting, yaitu: berkaitan dengan sistem rekrutmen calon TKI dan kelembagaan PPTKIS⁴³.

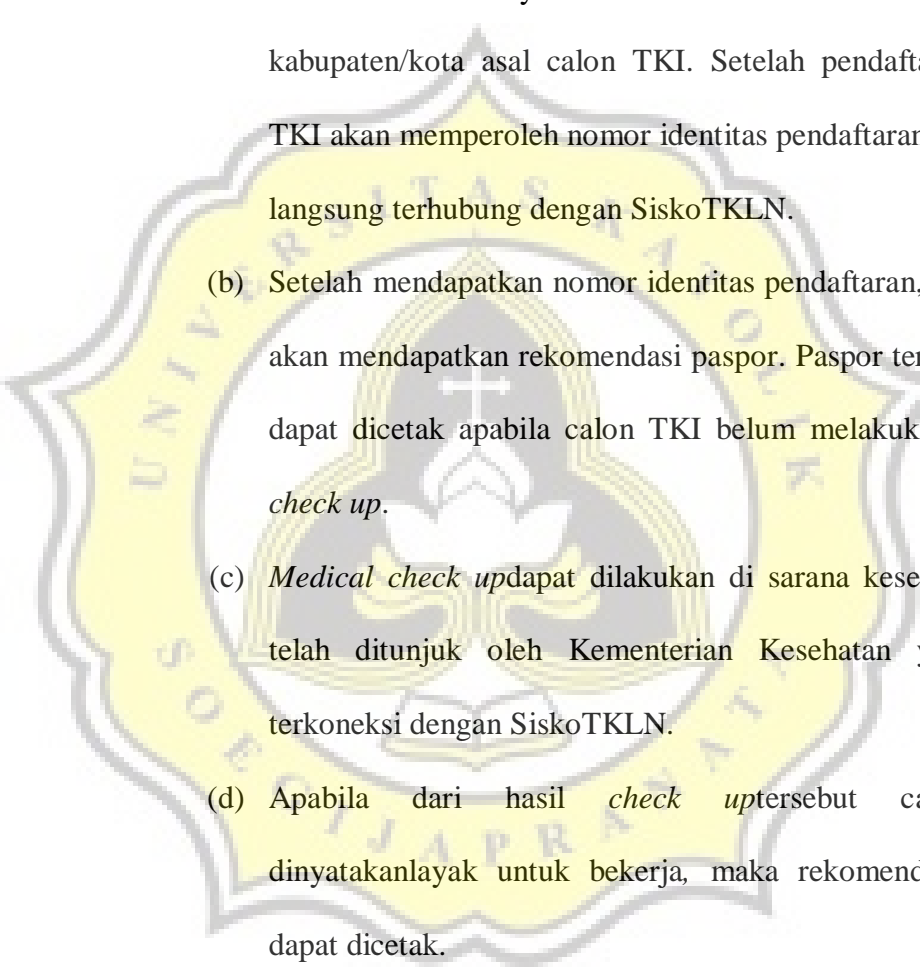
a. Sistem rekrutmen calon TKI.

Pengawasan sistem rekrutmen calon TKI ini merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap proses atau persyaratan

⁴³ Wawancara pribadi dengan Bapak Pujiono selaku kepala bagian pelayanan penempatan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, pukul 12.00.

yang harus ditempuh oleh calon TKI agar menjadi TKI *legal*.

Adapaun proses yang harus ditempuh agar menjadi TKI *legal* antara lain:

- 
- (a) Calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu ke dinas tenaga kerja kabupaten/kota asal calon TKI. Setelah pendaftaran, calon TKI akan memperoleh nomor identitas pendaftaran yang akan langsung terhubung dengan SiskoTKLN.
 - (b) Setelah mendapatkan nomor identitas pendaftaran, calon TKI akan mendapatkan rekomendasi paspor. Paspor tersebut tidak dapat dicetak apabila calon TKI belum melakukan *medical check up*.
 - (c) *Medical check up* dapat dilakukan di sarana kesehatan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang telah terkoneksi dengan SiskoTKLN.
 - (d) Apabila dari hasil *check up* tersebut calon TKI dinyatakan layak untuk bekerja, maka rekomendasi paspor dapat dicetak.
 - (e) Calon TKI untuk pekerja informal (misalnya pembantu rumah tangga) harus mengikuti BLKLN yaitu mengikuti pelatihan kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya, sedangkan untuk calon TKI pekerja formal tidak membutuhkan pelatihan kerja seperti layaknya pekerja informal.

(f) Pengawasan BLKLN menggunakan sistem durasi. Sistem durasi yang dipakai adalah jam pelajaran (jampel). Untuk pelatihan kerja dengan tujuan negara Taiwan dan Hongkong calon TKI harus menempuh 600 jampel, Singapura 400 jampel dan Malaysia 200 jampel.

(g) BP3TKI membuka sistem monitoring dan non monitoring untuk memberikan kesempatan bagi TKI yang mampu dan tidak mampu menempuh jampel. Sistem monitoring ini tidak berpedoman pada durasi waktu, sehingga calon TKI yang sudah mampu bekerja meskipun belum memenuhi jampel yang telah ditentukan dapat diberangkatkan ke luar negeri. Sedangkan sistem non monitoring berpedoman pada durasi waktu, apabila calon TKI belum menempuh jampel yang telah ditentukan maka calon TKI tidak dapat diberangkatkan ke luar negeri dan harus menyelesaikan jampel yang telah ditentukan. Uji kompetensi bertujuan untuk menguji kemampuan calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Uji kompetensi dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Calon Tki yang telah melakukan uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

(h) sertifikat tersebut diajukan untuk mengikuti PAP di BP3TKI;

- (i) setelah mengikuti PAP, calon TKI akan mendapatkan sertifikat PAP yang kemudian dicetak menjadi Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTKLN).

b. Kelembagaan PPTKIS

Pengawasan kelembagaan ini dilakukan terhadap surat perijinanyang dimiliki PPTKIS seperti SIPPTKI dan SIP. Selain surat ijin, pengawasan kelembagaan juga dilakukan terhadap fasilitas sarana prasarana yang dimiliki PPTKIS seperti sarana prasarana pelayanan penempatan, sarana prasarana pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI dan sarana prasarana tempat penampungan.

Pihak BP3TKI Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pengawasan dengan mengadakan pertemuan rapat pembinaan terhadap PPTKIS yang dilakukan secara rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dalam pertemuan tersebut BP3TKI memberikan informasi atau penyuluhan mengenai tata kelola sistem yang baru, hal-hal yang diperbaharui dan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan penempatan TKI ke luar negeri.

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan pengawasan dengan melihat kualitas yang dimiliki calon TKI. Kualitas calon TKI dari cabang PT. Mitra Sinergi Sukses dapat dilihat dari hasil uji kompetensi calon TKI. Apabila calon TKI lulus dalam uji kompetensi,

dapat disimpulkan bahwa calon TKI mendapatkan pelatihan dan sarana prasarana dengan baik⁴⁴.

b. Pengawasan pada masa purna penempatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS pada masa purna penempatan adalah dengan melihat laporan kepulangan TKI yang dilaporkan oleh PPTKIS. Kepulangan TKI ke negara asal merupakan tanggungjawab dari PPTKIS. PPTKIS berkewajiban mengurus kepulangan TKI yang telah berakhir perjanjian kerjanya. Perjanjian kerja TKI pada umumnya berlangsung selama 2 (dua) tahun. TKI yang ingin memperpanjang masa kontrak kerjanya dapat menghubungi pihak PPTKIS yang menempatkan dirinya. TKI yang memperpanjang masa kontrak kerjanya dapat langsung bekerja tanpa harus pulang ke negara asal terlebih dahulu. PPTKIS berkewajiban untuk melaporkan perpanjangan masa kontrak kerja kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Pengawasan terhadap PPTKIS secara khusus diatur dalam PP No. 4/2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP No. 4/2015, pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pada pra penempatan dan purna penempatan dilaksanakan melalui tahapan;

- a) preventif edukatif;
- b) represif non yustisia; dan/atau
- c) represif yustisia.

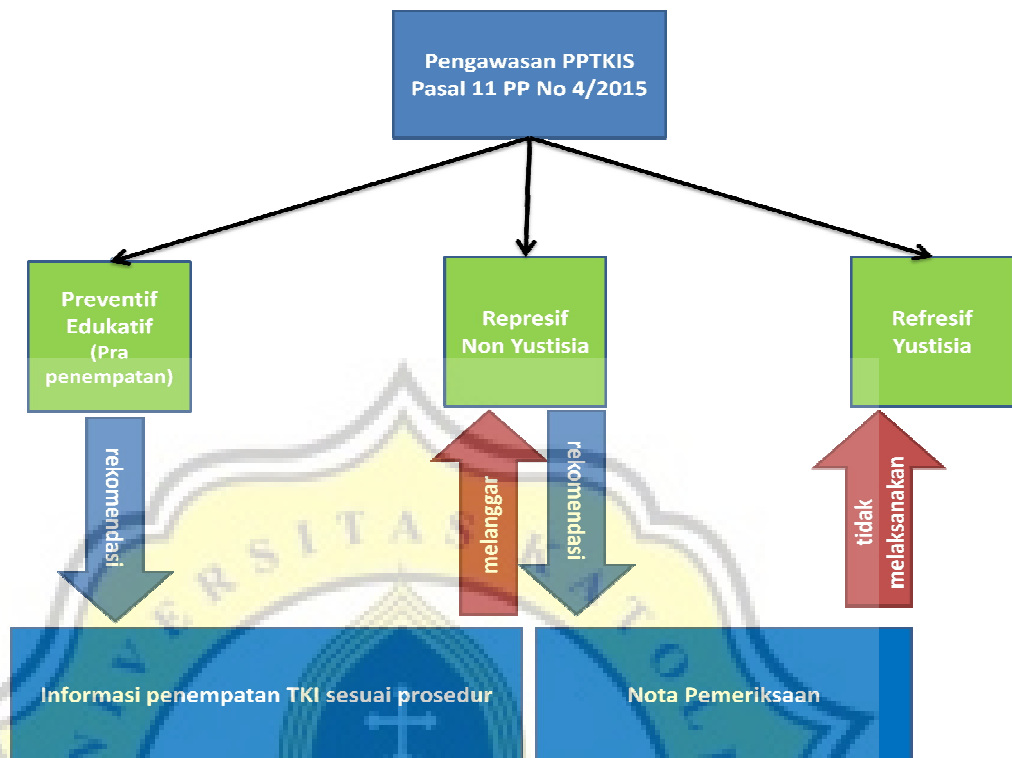
⁴⁴ Wawancara pribadi dengan Ibu Enik selaku staff pada PT. Mitra Sinegri Sukses, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2017, pukul 11.00.

Tiga bentuk pengawasan dalam Pasal 11 tersebut dilakukan secara bertahap baik dalam tahap pra penempatan maupun purna penempatan. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tahapan pengawasan preventif edukatif pada masa pra penempatan. Masa pra penempatan adalah masa yang penting untuk melakukan pengawasan, karena pada masa inilah rawan terjadinya pelanggaran. Pengawasan tahap preventif edukatif ini merupakan upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh PPTKIS. Pengawasan preventif edukatif yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ini dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis kepada PPTKIS dan calon TKI/TKI. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah memberikan pendampingan dan penasihatan teknis secara berkala yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Disnakertrans Jawa Tengah memberikan penyuluhan informasi kepada calon TKI pada masa pra penempatan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Pasal 10 Permenakertrans No. Per.14/MEN/X/2010, bahwa perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta jabatan;
- b) lokasi dan lingkungan kerja;
- c) tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
- d) waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
- e) tata cara dan prosedur perekrutan;
- f) persyaratan calon TKI;
- g) kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan dan fasilitas lain yang diperoleh;

- h) peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
- i) kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j) biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- k) hak dan kewajiban calon TKI.

Disnakertrans Jawa Tengah juga melakukan pengawasan tahap represif non yustisia. Pengawasan tahap represif non yustisia ini dilakukan ketika dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya dugaan suatu PPTKIS melakukan pelanggaran. Disnakertrans Jawa Tengah akan mengeluarkan nota pemeriksaan atau surat kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPTKIS yang di duga melakukan pelanggaran. PPTKIS yang mendapatkan nota pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penempatan TKI sesuai dengan perundang-undangan akan dilakukan tahap pengawasan selanjutnya yaitu represif yustisia. Pengawasan represif yustisia hanya dapat dilakukan apabila Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan preventif edukatif dan represif non yustisia. Pengawasan preventif yustisia merupakan upaya paksa yang dilakukan dengan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku PPNS. Dari paparan diatas, penulis mencoba menggambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Bagan 1.3 Tahap pengawasan PPTKIS berdasarkan PP No. 4/2015

3. Perubahan Sikap Setelah Adanya Pengawasan Pada Masing-Masing Tahap Penempatan.

Sebelum adanya sistem SiskoTKLN, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan secara langsung terhadap PPTKIS dengan cara melakukan kunjungan ke PPTKIS. Pengawasan langsung ini sulit untuk dilakukan karena keterbatasan pegawai pengawas yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pelaksanaan pengawasan langsung terhadap PPTKIS yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tidak dapat berjalan secara maksimal. Dengan adanya sistem SiskoTKLN ini mempermudah pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan tanpa harus datang ke lapangan. Pengawasan dengan sistem SiskoTKLN ini telah membawa perubahan terhadap sikap PPTKIS. Dari

hasil pengawasan yang dilakukan pada tahap pra penempatan dan purna penempatan, PPTKIS lebih tertib dalam melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. PPTKIS dalam melakukan perekrutancalon TKI/TKI saat ini lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Yang Melakukan Pelanggaran.

PPTKIS merupakan perusahaan jasa di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dalam melaksanakan kegiatan penempatan TKI harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan. PPTKIS yang tidak melakukan kegiatannyasesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan menerima sanksi administratif.Disnakertrans Provinsi Jawa Tengahmenerapkan sanksi administratif berdasar padaPasal 100 No. 39/2004 dan Pasal 3 Permenakertrans No. 17/2012.⁴⁵

Menurut ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No 23/2004 dan Pasal 3 Peermenakertrans No. 17/2012, ada 5 macam jenis sanksi administratif yaitu;

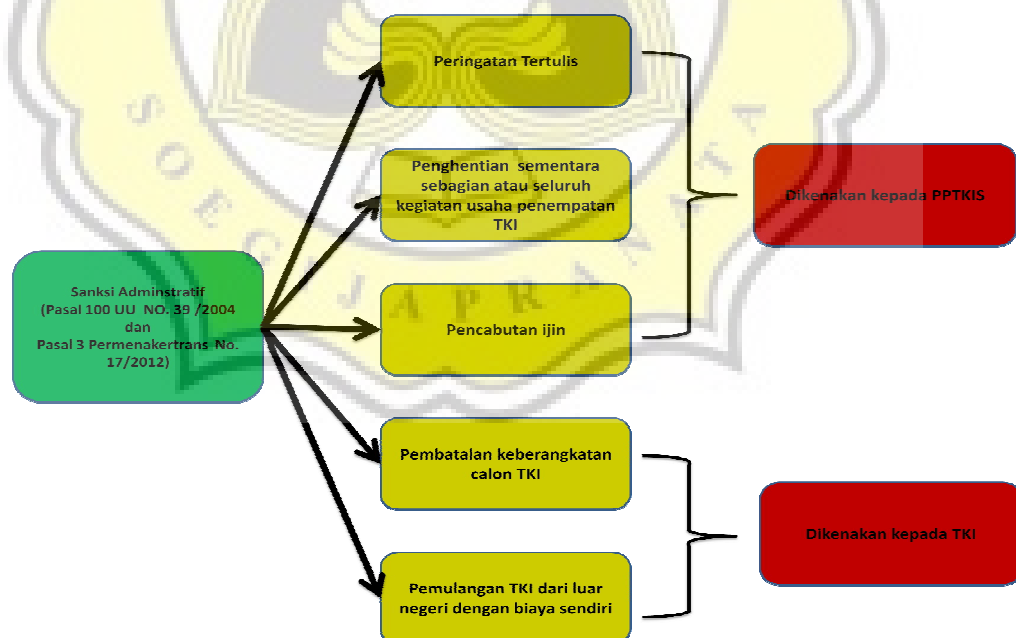
1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI (skorsing);
3. pencabutan izin;

⁴⁵Wawancara pribadi sengan Ibu Dian Sukmalestari selaku penyidik pegawai negeri sipil pada hari Jumat, pukul 07.30.

4. pembatalan keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia; dan
5. pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri dengan biaya sendiri.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI (skorsing) dan pencabutan izin dikenakan terhadap PPTKIS, sedangkan untuk sanksi administratif berupa pembatalan keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia, pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri dengan biaya sendiri dikenakan terhadap calon TKI atau TKI.

Penulis mencoba menggambarkan bagan sanksi administratif berdasarkan Pasal 100 UU No. 39/2004 dan Pasal 3 Permenakertrans No. 17/2012 sebagai berikut:



Bagan 1.4 Sanksi administratif pelaksana penempatan TKI

Dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas sanksi administratif yang dikenakan terhadap PPTKIS saja, karena penelitian ini tidak melakukan penelitian terhadap calon TKI dan TKI.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada PPTKIS dengan kriteria pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Permenakertrans No. 17/2012 yang menyatakan bahwa direktur jendral menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dalam hal PPTKIS:

1. tidak membentuk perwakilan di negara TKI ditempatkan sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
2. tidak melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan RI di negara tujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
3. tidak melaporkan kedatangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan RI di negara tujuan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
4. tidak melaporkan kepulangan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan RI di negara tujuan sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

PPTKIS yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut akan diberikan peringatan tertulis selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari PPTKIS tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dijatuhkan sanksi berupaskorsing.

Sanksi administratif berupa berupa *skorsing* dapat dikenakan terhadap PPTKIS dengan kriteria pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Permenakertrans No. 17/2012. Pasal tersebut menyatakan bahwa dirjen menjatuhkan sanksi administratif berupa *skorsing*, dalam hal:

1. tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
2. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
3. tidak menyampaikan secara lengkap dan benar informasi yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kepada calon TKI sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
4. tidak melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
5. tidak melakukan pengurusan persetujuan perpanjangan perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
6. tidak mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
7. menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004;
8. tidak mengurus TKI yang meninggal dunia sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
9. tidak memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Penerapan sanksi *skorsing* kepada PPTKIS ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Kemudian dirjen akan menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi PPTKIS selama masa skorsing. Apabila dalam masa skorsing tersebut PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan maka tindakan selanjutnya dirjen akan memberikan sanksi berupa pencabutan SIPPTKI.

Sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI terhadap PPTKIS dilakukan ketika PPTKIS melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1)

Permenakertrans No. 17/2012 yang menyatakan bahwa menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI, dalam hal:

1. menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
2. melakukan perekrutan tanpa memiliki SIP sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
3. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan perjanjian penempatan, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
4. membebankan biaya penempatan kepada calon TKI/TKI melebihi komponen biaya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

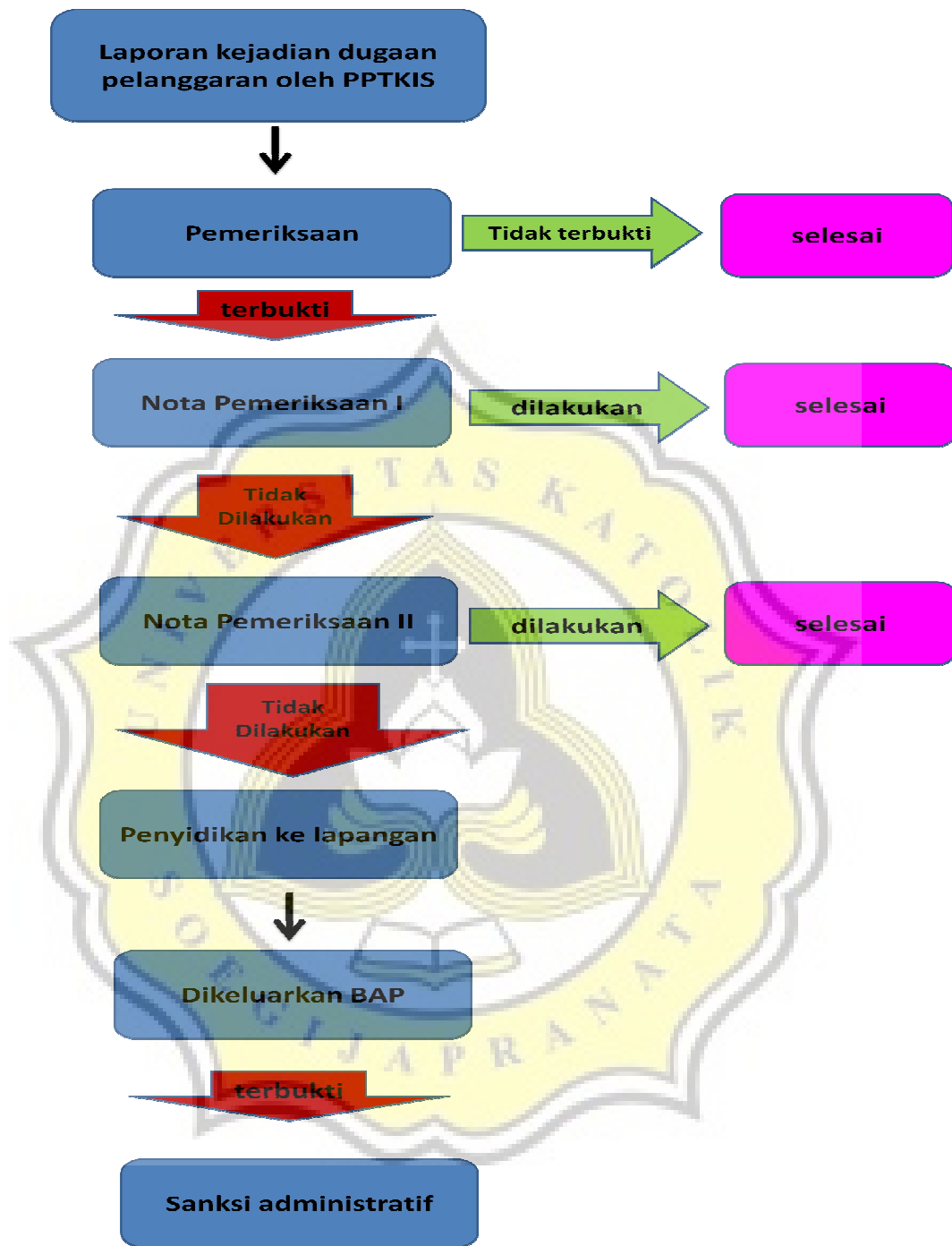
Sama halnya dengan sanksi skorsing, PPTKIS yang SIPPTKInya telah dicabut juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Permenakers No. 17/2012 yaitu:

1. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;
2. memberangkatkan calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dan visa kerja;
3. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
4. mengembalikan SIPPTKI kepada Menteri.

PPTKIS yang SIPPTKInya telah dicabut dapat mengajukan permohonan SIPPTKI baru setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIPPTKI dicabut dengan catatan PPTKIS telah melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Permenakers No. 17/2012.

Mekanisme penerapan sanksi bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran adalah apabila terdapat PPTKIS yang diduga melakukan pelanggaran, penyidik dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah akan menerima Laporan

Kejadian(LK). Laporan kejadian inidi dapat dari hasil laporan pengawas yang bertugas mengawasi PPTKIS. Setelah memperoleh laporan kejadian tersebut,selanjutnya pihak dinas akan melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan pihak Disnakertrans Jawa Tengah menerbitkan nota pemeriksaan I yang berisi perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu PPTKIS tersebut tidak melaksanakan apa yang tercantum dalam nota pemeriksaan I, maka pihak dinas akan menerbitkan nota pemeriksaan II yang berisi perintah untuk melaksanakan isi ketentuan dalam nota pemeriksaan I. Apabila ketentuan dalam nota pemeriksaan II tidak juga dilaksanakan, maka penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan akan memeriksa kembaliatau dengan datang ke perusahaan PPTKIS yang diduga melakukan pelanggaran. Penyidikantersebut bertujuan untuk meminta keterangan yang bersangkutan. Kemudian hasil penyidikan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika dari hasil pemeriksaanPPTKIS tersebut benar terbukti melakukan pelanggaran, maka PPTKIS tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah di uraikan di atas berdasarkan kriteria pelanggaran yang dilakukan.



Bagan 1.5 Mekanisme penerapan sanksi administratif

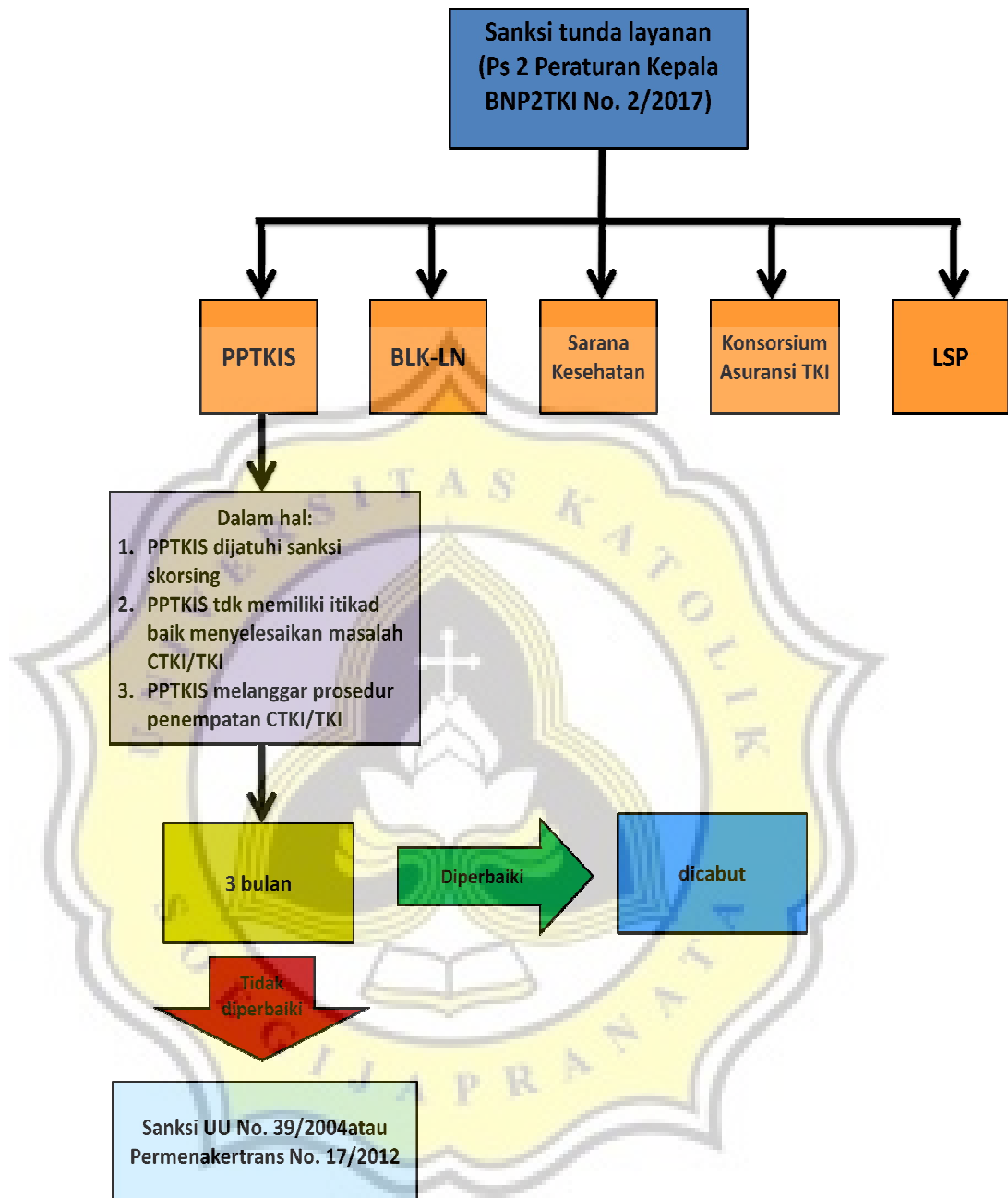
Selain sanksi yang tertuang dalam UU No. 39/2004 dan Permenakertrans No. 17 Tahun 2012, BP3TKI juga memberikan sanksi tunda layanan kepada

pihak PPTKIS yang tidak sesuai prosedur.⁴⁶ Sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia bahwa sanksi tunda layanan dapat dikenakan terhadap lembaga antara lain :

1. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
2. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN);
3. sarana kesehatan;
4. Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Konsorsium Asuransi TKI);
5. Lembaga Keuangan; dan
6. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Pengenaan sanksi tunda layanan dapat dikenakan kepada PPTKIS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (untuk selanjutnya disebut Peraturan BNP2TKI No. 02/2016). Sanksi tunda layanan terhadap PPTKIS ini dikenakan dalam hal: PPTKIS mendapatkan sanksi skorsing, PPTKIS tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami calon TKI/TKI, PPTKIS tidak melakukan penempatan sesuai prosedur.

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Pujiono selaku kepala bagian pelayanan penempatan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, pukul 12.00.



Bagan 1.6 Pengenaan sanksi tunda layanan kepada PPTKIS

Sanksi tunda layanan adalah sanksi dimana PPTKIS yang melakukan pelanggaran tidak dapat melakukan kegiatan penempatan TKI. Sanksi tunda layanan merupakan sanksi yang bersifat sementara karena hanya dikenakan dalam jangka waktu tiga bulan. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan

PPTKIS yang kena sanksi tunda layanan sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan tidak melakukan pelanggaran lagi, maka sanksi tunda layanan dapat dicabut.

Sanksi tunda layanan dan sanksi yang tercantum dalam UU No.39/2004 dan Permenakertrans No. 17 Tahun 2012 ternyata cukup memberikan efek jera kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi PPTKIS karena PPTKIS tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai perusahaan penyedia jasa calon TKI

Berikut merupakan data PPTKIS kantor pusat yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1.1
Daftar PPTKIS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

NO	NAMA PPTKIS	ALAMAT	KAB/ KOTA
1	PT. Graha Indrawahana Perkasa	Jl. Puri Anjasmoro Blok A2/29 Semarang	Semarang
2	PT. Graha Mitra Balindo	Jl. Permata Hijau BB-10 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara	
3	PT. Tafcindo Jasatama Segara	Jl. Pemuda No. 150 Rukan Pemuda Mas Kav B.4, Semarang	
4	PT. Kanzana Rossie	Jl. Cendrawasih No. 17A, C, D Semarang	
5	PT. Tangguh Makmur Sejahtera	Jl. Cendrawasih No. 17 A Semarang Jawa Tengah	
6	PT. Victoria Lintas Buana	Jl. Raya Semarang Demak KM 6,5 No. 244 Semarang	
7	PT. Putra Bragas Mandiri	Jl. Randu Garut Raya No. 15 Wonosari Ngaliyan Semarang	
8	PT. Phinisi Sumber Daya	Jl. Gasem Sari No. 7 Tlogomulyo Pedurungan Semarang Jawa Tengah	

9	PT. Tegar Sukses Abadi	Jl. Plamongsari Raya No. 14A Pedurungan Kidul RT.3 RW.7 Semarang	
10	PT. Arni Family	Jl. Kertanegara No. 20A, Langensari Barat RT. 02/Rw.04 Kec. Ungaran Barat	Kabupaten Semarang
11	PT. Maju Putra Dewangga	Jl. Tohjoyo N0.3 A RT.06 RW.01 Langensari, Ungaran, Semarang Jawa Tengah	
12	PT. Sofia Sukses Sejati	Jl. Raya Dawungsari No. 4A, Pengandon, Kendal Jawa Tengah	Kabupaten Kendal
13	PT. Sarimadu Jayanusa	Jl. Soekarno Hatta No. 75 Kendal	
14	PT. Sarana Insan Mandiri	Jl. Taman Gede Raya No. 110 RT.04/ RW.01 Kec. Gemuh Kab. Kendal-Jawa Tengah	
15	PT. Cikal Dian Astuti	Jl. Mangga No. 02 Montongsari Weleri, Kendal, Jawa Tengah	
16	PT. NahelindoPratama	Jl. Sunan Abinawa Km. 05 Patebon Kendal	Pati
17	PT. Dewi Pengayom Bangsa	Jl. Raya Pati-Tayu Km .01 Kutoharjo Pati 59118 Jawa Tengah	
18	PT. Pelita Karya Juhari	Jl. Gabus-Winong Km. 5 Ds. Winong Kab.Pati-Jawa Tengah	
19	PT. Surya Jaya Utama Abadi	Jl. Dukuh Bendan RT.004/003 Mojo Pitu Kel. Pati Kidul, Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar
20	PT. Rizaldy Bina Bersama	Jl. Adi Sumarmo Tohudan RT. 06/04 Tohudan, Colomadu, Karanganyar	
21	PT. Hasindo Karya Niaga	Jl. Surabaya No. 55 Pekalongan	Kota Pekalongan
22	PT. Sentosa Karya Mandiri	Jl. Gotong Royong No. 3 Rt.05 RW.04 Kel. Kutabanegara Kab. Banjarnegara 53415 Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara
23	PT. Bina Bahtera Karya Mandiri	Jl. Kendeng No. 307, Cilacap	Kabupaten Cilacap
24	PT. Sanjaya Thanry	Jl. Kalidonan No. 89A	

	Bahtera	RT.004 RW XIII Donan-Cilacap	
25	PT. Al Wihdah Jaya Sentosa	Jl. Thamrin No. 126 Lomanis-Cilacap-Cilacap Jawa Tengah	
26	PT. Bella Sukses Mandiri	Jl. Soekarno Hatta No. 133 RT.04/01 Ds. Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap Jawa Tengah	

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas, Kota Semarang terdapat 9 (sembilan) PPTKIS, Kabupaten Semarang terdapat 2 (dua) PPTKIS, Kabupaten Kendal terdapat 5 (lima) PPTKIS, Pati terdapat 3 (tiga) PPTKIS, Kabupaten Karanganyar terdapat 1 (satu) PPTKIS, Kota Pekalongan terdapat 1 (satu) PPTKIS, Kabupaten Banjarnegara 1 (satu) PPTKIS dan Kabupaten Cilacap terdapat 4 (empat) PPTKIS.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, di awal tahun 2017 terdapat beberapa PPTKIS yang mendapatkan sanksi skorsing selama tiga bulan seperti: PT. Dewi Pengayom Bangsa, PT. Cikal Dian Astuti, PT. Bella Sukses Mandiri, PT. Victoria Lintas Buana, PT. NahelindoPratama, PT. Sanjaya Thanry Bahtera, dan PT. Phinisi Sumber Daya.⁴⁷ Rata-rata PPTKIS tersebut melakukan pelanggaran yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34, Pasal 54 dan Pasal 72 UU No. 39/2004. Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34, Pasal 54 dan Pasal 72 yaitu;

⁴⁷Wawancara pribadi dengan Ibu Erry Diah Nurhidayah kepala seksi pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, hari Rabu 19 Juli 2017 pukul 11.00.

1. PPTKIS tidak memberikan informasi kepada calon TKI/TKI mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan, situasi kondisi di negara tujuan, hak dan kewajiban sebagai TKI, dan tata cara perekrutan yang benar;
2. PPKTIS tidak melaporkan perjanjian penempatan kepada instansi pemerintah; dan
3. PPTKIS menempatkan TKI tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.

